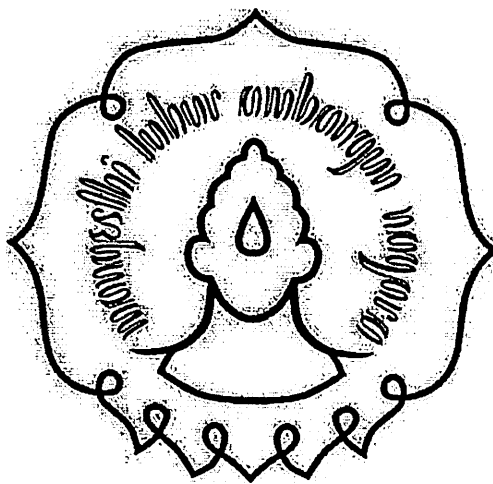


LAPORAN KEGIATAN
“SEMINAR CYBER NOTARY DALAM PERSPEKTIF UUJN DAN
HUKUM PEMBUKTIAN”
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET



PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2015

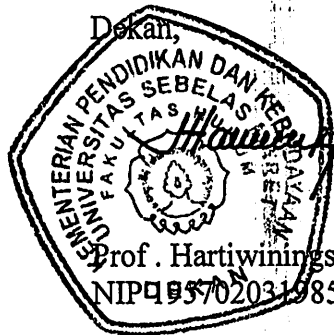
HALAMAN PENGESAHAN

1. Nama Program : P1 Keunggulan dalam Pendidikan dan Kemahasiswaan
P.1.1 Pengembangan Mutu Pendidikan , Pengalaman Belajar dan Perluasan Akses Belajar Pengembangan Dan Pembinaan Kemahasiswaan
2. Nama Kegiatan : *“Seminar Nasional Cyber Notary Dalam Perspektif UUJN dan Hukum Pembuktian “*
3. Nama Sub Kegiatan : Peningkatan Implementasi KBK
4. Hari/Tanggal : Sabtu 23 Mei 2015
5. Tempat Pelaksanaan : Aula Gedung III FH UNS
6. Jumlah Peserta : 300 orang
7. Jumlah Panitia : 10 orang
8. Jumlah Dana : Rp. 6.032.500,00
9. Sumber Dana : DIPA BLU

Surakarta, 10 April 2015

Mengetahui,

Dekan,



Prof. Hartiwiningsih, SH., M.Hum
NIP. 195702031985032001



Burhanudin Harahap, S.H., M.H., M.SI., Ph.D
NIP. 19600716 198503 1 004

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesatnya membawa manfaat yang sangat luar biasa bagi perkembangan komunikasi. Komunikasi antara individu satu dengan individu lain yang biasanya dilakukan dengan cara bertemu langsung dan bertatap muka atau face to face, kini bisa dilakukan dari jarak jauh dan tanpa bertatap muka dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi.

Saat ini perkembangan Cyber Notary memang dirasakan masih sebagai wacana dan belum menjadi suatu kebutuhan, walaupun teknologi memungkinkan peran notaris secara online, namun secara hukum hal tersebut seakan belum dapat dilakukan. Untuk itu menerapkan Cyber Notary di Indonesia tidaklah mudah.

3. TUJUAN

1. Memberikan pengetahuan hukum tentang pendidikan Cyber Notary di Indonesia.
2. Meningkatkan eksistensi perguruan tinggi di Indonesia dalam mempersiapkan ketrampilan dan pengetahuan calon notaris.

3. PELAKSANAAN

- o Lokasi : AULA Gd III Fakultas Hukum UNS
- o Jadwal Pelaksanaan : Sabtu 23 Mei 2015
- o Peserta : Mahasiswa 300 orang

4. INDIKATOR KERJA


Indikator	Kondisi Akhir 2015	Akhir tahun 2014		Akhir tahun 2015	
		Target	Capaian	Target	Capaian
Rerata lama studi	3,5 thn	3 thn		2,5 thn	

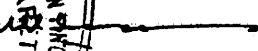
5. PENUTUP

Kegiatan Seminar ini menambah wawasan dan profesional mahasiswa ditengah perkembangan zaman yang serba online dan dengan lahirnya UUTE diharapkan transaksi elektronik termasuk dibidang hukum mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan alat bukti bisa menerapkan Cyber Notary di Indonesia tidaklah mudah.

Surakarta, 10 November 2015

Mengetahui,

Dekan

Prof. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum
NIP. 195702031985032001

Ketua

Burhanudin Harahap, S.H., M.H., M.SI., Ph.D
NIP. 19600716 198503 1 004



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS HUKUM UNS

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

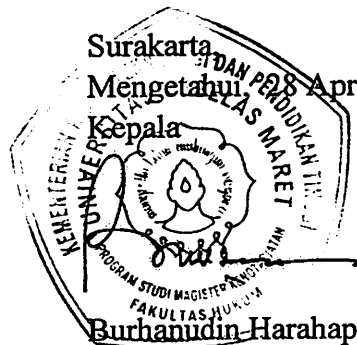
Jl. Ir. Sutami No.36A, Ketingan, Surakarta 57126

Telepon: (0271) 646994, 646624, 646761, Faximile (0271) 656429

<http://www.uns.ac.id>

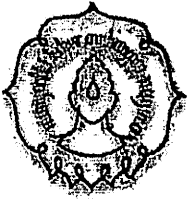
**DAFTAR PEMBICARA SEMINAR CYBER NOTARY DALAM PERSPEKTIF UJUN DAN HUKUM P
TAHUN 2015**

No.	Nama	NIP	Jabatan dalam Kepanitiaan	sesi
1	Prof Dr Supanto, SH.MHum	19601107198603000	Pembicara	1
2				
3	Dsb.....			



Burhanudin Harahap, SH.,MH, MSI, Ph.D

NIP 196007161985031000



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS HUKUM

Jl. Ir. Sutami No. 36 A Kentingan Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271 664989

Ok

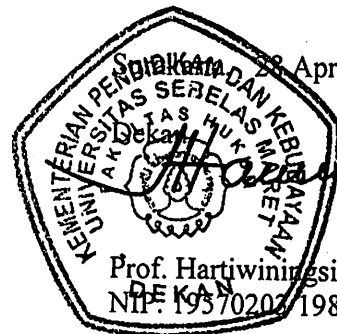
SURAT TUGAS

Nomor : 986a/UN27.03/PP/2015

Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Seminar Nasional “ Cyber Notary Dalam Perspektif UUJN Dan Hukum Pembuktian “ pada Pogram Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNS yang diselenggarakan pada hari Sabtu 23 Mei 2015 di maka Dekan Fakultas Hukum menugaskan nama-nama di bawah ini sebagai tim pelaksana kegiatan tersebut dengan susunan sebagai berikut :

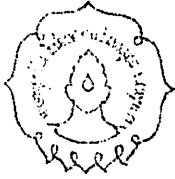
- Penanggung Jawab : Prof. Hartiwiningsih, SH.,MHum (Dekan)
- Pengarah : Dr. Hari Purwadi , SH.,MH (Pembantu Dekan I)
Dr. I Gusti Ayu KRH, SH.,MM (Pembantu Dekan II)
- Ketua : Burhanudin Harahap, SH.,MH,MSI, Ph.D
- Sekretaris : Moch. Najib Imanullah, SH.,MH, Ph.D
- Anggota : - Bambang Santoso, SH.,MH
- Sulasmi, SPd
- Yurisma Taufiq,SE
- Wardyanto, SH.,MH
- Noor Saptanti, SH.,MH

Demikian agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan membuat laporan setelah tugas selesai.



Surakarta, 8 April 2015

Prof. Hartiwiningsih, SH.,MHum
NIP. 19570207198503 2001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS HUKUM

Jl. Ir. Sutami No. 36 A Ketingan Surakarta 57126 Telp./Fax. 0271 664989

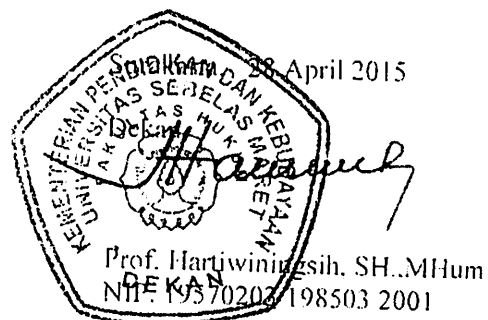
SURAT TUGAS

Nomor : /UN27.03/PP/2015

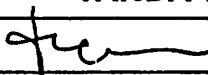
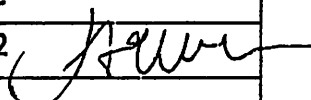
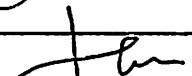
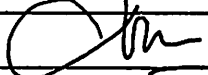
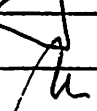

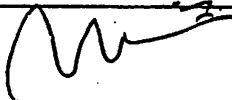

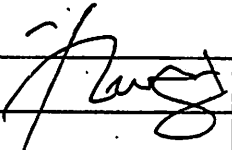
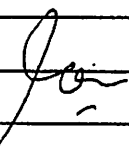
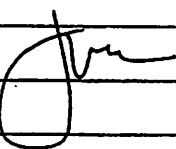
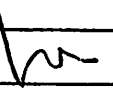
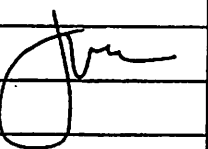

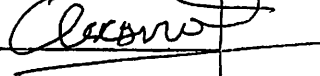
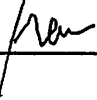

Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Seminar Nasional “ Cyber Notary Dalam Perspektif UUJN Dan Hukum Pembuktian “ pada Pogram Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNS yang diselenggarakan pada hari Sabtu 23 Mei 2015 di maka Dekan Fakultas Hukum menugaskan nama-nama di bawah ini sebagai tim pelaksana kegiatan tersebut dengan susunan sebagai berikut :

- Penanggung Jawab : Prof. Hartiwiningsih, SH.,MHum (Dekan)
- Pengarah : Dr. Hari Purwadi , SH..MH (Pembantu Dekan I)
Dr. I Gusti Ayu KRH. SH..MM (Pembantu Dekan II)
- Ketua : Burhanudin Harahap, SH..MH,MSI, Ph.D
- Sekretaris : Moch. Najib Imanullah, SH..MH, Ph.D
- Anggota : - Bambang Santoso, SH..MH
- Sulasmi, SPd
- Yurisma Taufiq,SE
- Wardyanto, SH..MH
- Noor Saptanti. SH..MH

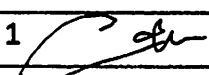


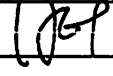
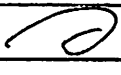
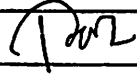



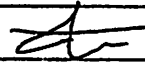
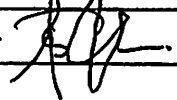
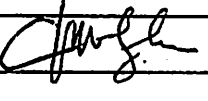
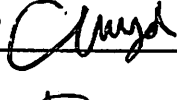
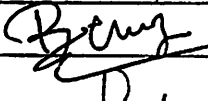
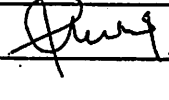
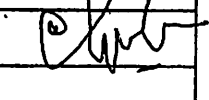
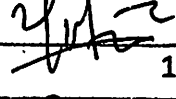

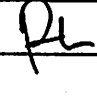
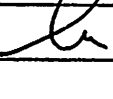
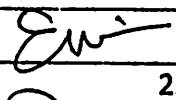
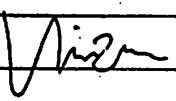
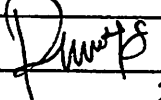
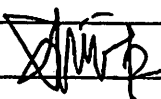
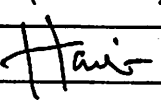
Demikian agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan membuat laporan setelah tugas selesai.



**DAFTAR HADIR TAMU UNDANGAN SEMINAR NASIONAL
 "CYBER NOTARY DALAM PERSPEKTIF UJUN DAN HUKUM PEMBUKTIAN"
 MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNS
 SURAKARTA, 6 JUNI 2015**

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	KETUA INI SURAKARTA	1 
2	KETUA INI SRAGEN	2 
3	KETUA INI WONOGIRI	3
4	KETUA INI-KARANGANYAR	4 
5	KETUA INI SUKOHARJO	5 
6	KETUA INI BOYOLALI	6 
7	MUHAMAD ALTING, S.H., M.Kn	7 
8	SULAIHA, SH., M.Kn SEKRETARIS PENGURUS WILAYAH IKATAN NOTARIS INDONESIA PROPINSI JATENG	8 
9	Dr. MUHAMAD HAFIDH, SH., M.Kn KETUA BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGURUS WILAYAH IKATAN NOTARIS INDONESIA PROPINSI JAWA TENGAH	9 
10	WAHYU NUGROHO, SH., Sp.N	10 
11	SUNARTO, SH., Sp.N	11
12	AGUS SAPTONO, SH., Sp.N	12 
13	SUSILOWARDANI, SH., M.Kn	13
14	ANDREA INDIRAWATI, SH., Sp.N	14 
15	ABDUL SYUKUR HASAN (PP INI)	15 
16	SALEH HARTANTO (PENGDA KLATEN)	16 
17	SUGIARTO (PENGWIL JATENG)	17 
18	SUZANA WIDIJANTI	18 
19	IRENE VERA P., SH	19 
20	MARDIANA MARUWI, SH	20 
21		21
22		22
23		23
24		24
25		25

DAFTAR HADIR PANITIA SEMINAR NASIONAL
"CYBER NOTARY DALAM PERSPEKTIF UJUN DAN HUKUM PEMBUKTIAN"
MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNS
SURAKARTA, 6 JUNI 2015

NO	NAMA	NIM	TANDA TANGAN
1	ADITYA GALIH UTAMA	S 351408001	1 
2	DEWI LAILUL RAHMADANIK	S 351408003	2 
3	NAELY ISTIQOMAH	S 351408005	3 
4	NOBEL PRABOWO PUTRA	S 351408006	4 
5	NUR RIDWAN ARI SASONGKO	S 351408007	5 
6	RAFIQ ARI WARDANA	S 351408009	6 
7	RINDA AJENG PRATIWI	S 351408010	7 
8	YUSTININGRUM WAHYU	S 351408011	8 
9	ALDIN DERLIANTO	S 351408013	9 
10	ANDHYKA MUCHTAR	S 351408014	10 
11	ANDRIYANTO	S 351408015	11 
12	ANIK SURYANI	S 351408016	12 
13	ARJID NABLA PERDANA	S 351408017	13 
14	BENI SURYA	S 351408018	14 
15	BUDI SANTOSO	S 351408019	15 
16	CHARLES ADRIANTO	S 351408020	16 
17	CITRA WIDI WIDYAWATI	S 351408021	17 
18	ELDYSSA RAKHMA P.	S 351408022	18 
19	ERLINA KUSUMANINGDIAH	S 351408023	19 
20	EVALINA YESSICA	S 351408024	20 
21	EVI SUSTYANINGRUM	S 351408025	21 
22	FARIZAL CATURHUTOMO	S 351408026	22 
23	FITRI RAHMAWATI P.	S 351408027	23 
24	FITRIA HUDANINGRUM	S 351408028	24 
25	HASIM ASHARI	S 351408029	25 

**DAFTAR HADIR PANITIA SEMINAR NASIONAL
 "CYBER NOTARY DALAM PERSPEKTIF UJUN DAN HUKUM PEMBUKTIAN"
 MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNS
 SURAKARTA, 6 JUNI 2015**

NO	NAMA	NIM	TANDA TANGAN
26	HERA DWI NURWITASARI	S 351408030	26
27	LINGGA BASKARA	S 351408032	27
28	NOVIYANTI EKATAMA	S 351408034	28
29	PANGLIPURING TYAS T.A.	S 351408035	29
30	RETNO MARWATI	S 351408037	30
31	RIAN TRI JATMIKO	S 351408038	31
32	RISKI SUKMA HAPSARI	S 351408039	32
33	RISKIYA ANGGITAWAN	S 351408040	33
34	RM. SAYID WIRAHAJI S.K.	S 351408041	34
35	ST. WAHYU WIBOWO	S 351408042	35
36	SULIS AFRIYANI	S 351408043	36
37	TARITA KOOSWANTO	S 351408044	37
38	TYAS PRIHATANIKA H.B.W.	S 351408045	38
39	WANGSIT PANITIS	S 351408046	39
40	WINNA SAMPAGUITA	S 351408047	40

Ketua

Andhyka Muchtar

Penanggungjawab
Sekretaris

Fitri Rahmawati P.

Bendahara

Evi Sustyaningrum

**DAFTAR HADIR SEMINAR NASIONAL
 "CYBER NOTARY DALAM PERSPEKTIF UUJN DAN HUKUM PEMBUKTIAN"
 MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNS
 SURAKARTA, 6 JUNI 2015**

NO	NAMA PESERTA	TANDA TANGAN
276	FAJAR BUDIANTO	276 <i>Fajar</i>
277	GALANG GESIT	277 <i>Gesit</i>
278	HARRI SAPTO PRAYOGO	278 <i>Harri</i>
279	DIAN SARI TRI ASHARI	279 <i>Dian</i>
280	JEFRY SARAGIH	280 <i>Jefry</i>
281	JATMIKO	281 <i>Jatmi</i>
282	NIAR JUNIANTI	282 <i>Niar</i>
283	MUSTIKA MANDASARI	283 <i>Mustika</i>
284	MAHARANI PUTRI	284 <i>Maha</i>
285	SATRIYA DEWANTO	285 <i>Satriya</i>
286	SUSILO PRANOTO	286 <i>Susilo</i>
287	SENDY CLAUDIA	287 <i>Sendy</i>
288	TRI AYU PRATIWI	288 <i>Tri Ayu</i>
289	ULFA MARIA NOVA	289 <i>Ulfa</i>
290	WENDY PURNOMO	290 <i>Wendy</i>
291		291
292		292
293		293
294		294
295		295
296		296
297		297
298		298
299		299
300		300

Bidang-bidang Jasa Kenotarian Dalam Perspektif Cybernotary

I. PENGANTAR

"Cybernotary" adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangan notaris. Digitalisasi dokumen merupakan tantangan bagi notaris, terutama berkaitan dengan otentikasi dan legalisasi dokumen.

Dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui system elektronik.

Hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dikenal dengan istilah hukum siber (cyber law). Dalam kenyataannya, kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu Negara, yang mudah diakses kapanpun dan darimanapun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet. Disamping itu, pembuktian merupakan factor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam system hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik.

Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.

Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui system elektronik (electronic commerce) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media dan komunikasi.

II. CYBERNOTARY (Notaris Siber)

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Pasal 15 ayat 1 Undang-undang tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Menurut Pasal 1868 KUHPerdara :

"Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya".

Perbedaan peranan ini adalah akibat perbedaan kewenangan notaris dalam system hukum : common law dan civil law.

CyberNotary adalah istilah yang diciptakan oleh American Bar Association untuk menggambarkan Notaris yang berwenang memverifikasi "*public key infrastructure / digital signatures*" dan mempraktekkan Hukum Notaris Internasional.

Transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui system elektronik (electronic commerce), dimana struktur dasarnya pada tanda tangan digital (digital signatures) dan infrastruktur kunci public (public key infrastructure) lainnya, berpotensi mengenyampingkan peran Notaris, dimana praktek Notaris masih berdasarkan pada transaksi diatas kertas dan wajib menggunakan tanda tangan dan stempel tradisional serta pengaman. Pesatnya pertumbuhan electronic commerce menimbulkan permasalahan kepada masa depan profesi Notaris secara global.

CyberNotary harus memiliki pengetahuan dan keahlian teknologi computer yang cukup memadai, mempunyai integritas yang tinggi untuk melakukan transaksi online antar kota dan internasional.

Agar e-commerce dapat berjalan baik, diperlukan standard internasional untuk cybernotary, selain itu, diperlukan suatu badan internasional khusus yang akan menilai notaris dengan latar belakang pengalaman dan pengetahuan apakah sudah sesuai dengan standard internasional mengenai cybernotary.

Bidang Jasa Kenotarisan dalam Perspektif CyberNotary

Tidak ada perangkat peraturan perundang-undangan di dalam system hukum kita yang telah mengadopsi ketentuan dan aturan mengenai cybernotary. Undang-Undang tentang Jabatan Notaris tidak memungkinkan Notaris untuk melakukan transaksi secara elektronik. Saat ini, hanya untuk penyelenggaraan RUPS saja yang telah diatur oleh undang-undang (Undang-

- Memvalidasi kapasitas penandatanganan
 - Memvalidasi otoritas penandatanganan
- termasuk juga validasi dari sertifikat digital.

III. KESIMPULAN

1. Sampai dengan saat ini belum ada perangkat peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai transaksi elektronik yang melibatkan peran Notaris (Cybernotary), namun secara teknis Indonesia siap melaksanakan cybernotary mengingat system dan perangkat teknologi informasi penunjang cybernotary saat ini yang sudah dipersiapkan sejak tahun 1990-an.
2. Namun ada kesempatan untuk membuat ketentuan dan aturan mengenai Cybernotary, dengan adanya rencana Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta Undang-undang yang terkait, sehingga Cybernotary dapat diterapkan di Indonesia.
3. Aturan dan ketentuan yang akan diusulkan untuk diajukan dalam Perubahan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris adalah tidak hanya peran Notaris dalam system hukum privat, menjamin keotentisitas akta yang dibuatnya dan dibuat di hadapannya mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang, namun juga dapat memvalidasi isi hukumnya, memvalidasi tanda tangan digital, memvalidasi identitas penandatanganan, memvalidasi kapasitas penandatanganan, memvalidasi otoritas penandatanganan, termasuk juga validasi dari sertifikat digital.

Cybernotary/E-notary



by :
Dr. Edmon Makarim, S.Kom., SH., LL.M.
Research's Team of Technology Law Research Institute
Faculty of Law, University of Indonesia (LKHT-FHUJ).

the XXIV International Congress of Latin Notaries held in Mexico City 2004

The representatives of all member countries of the International Union of Latin Notaries, who met on the 18th, 19th and 20th October 2004 as part of the XXIV International Congress of Latin Notaries held in Mexico City, wish to inform you that, in accordance with article 23.8 of the Statutes of the International Union of Latin Notaries, a committee was appointed to draw up this report which contains the results of the debate on seventeen written reports which were orally presented.

Conclusions:

1. Whereas digital signatures are a technical tool which can serve the notarial function, we request that member notaries be equipped with the necessary means for encouraging the introduction of the new technologies, the training of notaries and the use of digital signatures. The IUNL should develop and settle the guidelines of a certification policy in relation to a notarial digital signature in member countries, setting out the principles and common points thereof.
2. Whereas an electronic notarial deed is to meant to be rapidly and effectively distributed we request that the International Union of Latin Notaries promote, in relation to the rules and principles which it will develop, guidelines for certification policies for digital certification in member countries.
3. Whereas for the free international circulation of electronic notarial deeds there must be a general method for verifying the signature and the capacity of the presiding notary, we request that the certification of the notary's digital signature remain under the control of the member notaries, whilst observing the principals and methods which are developed for such verification on a global level

Pendahuluan

- Hague Agreement 1961 (The Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents) => E-Apostille
- Int'l Latin Notaries conference 2004 in Mexico City => e-authentic deeds
- UN Convention on the Use of Electronic Communication in International Contract (2005) => Global transaction B2B
- US Model Notary Act, 2010 => Notaries public play a vital role in assuring the integrity of documents essential to commercial and legal transactions. Recognizing the societal importance of this function, the paramount objective of the Model Notary Act of 2002 was to enable notaries to protect the public from fraud



NB:
• Constitutional Review of Art.88 UUD 2004 concerning Municipal Election => "punching ballot" is "conditionally unconstitutional": if the society and technical infrastructure were ready for e-voting => after e-KTP (e-ID)
• Art 16 section (1) point (1) elucidation of Notaries Law: That the notary must be physically present and signed the deed in the presence of the persons and the witnesses.

4. Whereas the member notaries should guarantee the application of new technology to the notarial function, and it is fundamental that the basic principles of the Latin notarial remain unaltered in electronic commerce, taking into account the role of the notary in the same, and the prevention of conflicts in legal relations, the notary thereby giving added value with regard to the requirements of security and trust required by modern society we request that member notaries ensure the retention of the inherent requirements of a notarial deed which are, amongst other things, the physical presence of the parties before the notary, the parties' and the notary's signatures, the dating and the archiving of the notarial deed by the notary, both in the case of electronic documents as well as paper ones, thereby ensuring its probatory and executory force, in the best interests of society.
5. Whereas the new technologies are an important tool for communication between citizens and public authorities, this being a vital tool for the modernisation thereof we request that the role of the notary as a public official in relation to public registries and the Administration in general be underlined by adopting the legal and technological regulations necessary to make them, secure and available, in particular by guaranteeing direct access for notaries to Public Registries for the fulfillment of his public office.
6. Whereas the Latin notary contributes to the creation of a global legal secure environment through the free circulation of notarial deeds, with their probative and executory force, both electronically or on paper we request that technical and legislative rules be adopted for the full recognition of such documents at a global level.
7. Whereas there are varying degrees of development of the new technologies in among the member notaries we request that the principal of solidarity and mutual assistance be paramount, which is inherent to the principles of the International Union of Latin Notaries.

Definition

Cybernotary:
ABA Information Security Committee 1994

Certification Authority (T3P)
UETA + E-sign => E-notarization
Cybernotary can authenticate a document

- validating its legal contents
- validating the digital signature
- validating the identity of the signer
- validating the capacity of the signer
- validating the authority of the signer, and
- validation of the digital certificate

Electronic Notary:
French Delegation, Trade EDI system (EDIS) legal workshop, EDI Conference, EU-Brussels 1989

This conference proposed that various industry associations and related peak bodies could act as an "electronic notary" to provide an independent record of electronic transactions between parties

- Notary can have a supporting function in ICT as T3P
 - Depositing or facilitating the source code escrow (e.g Dutch)
 - Registration Authorities of legalization or verification of the conventional ID before they having the e-certificate from CSP
- Delivering the Notarization services by e-system to the public.
 - E-authentic deeds

Pelayanan Publik (UU 25/2009)	UU 30/2014 Administrasi Pemerintahan
<p>Pasal 24</p> <p>Dokumen, akta, dan sejenisnya yang berupa produk elektronik atau nonelektronik dalam penyelenggaraan pelayanan publik dinyatakan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan..</p> <p>Penjelasan: Cukup Jelas</p>	<p>Pasal 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. 2. Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. 11. Keputusan Berbentuk Elektronik adalah Keputusan yang dibuat atau disampaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan media elektronik. 12. Legalisasi adalah pernyataan Badan atau Pejabat Pemerintahan tentang keabsahan suatu salinan surat atau dokumen administrasi pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan aslinya; 13. Sengketa Kewenangan adalah klaim penggunaan Wewenang yang dilakukan oleh 2 (dua) Pejabat Pemerintahan atau lebih yang disebabkan oleh tumpang tindih atau tidak jelasnya Pejabat Pemerintahan yang berwenang menangani suatu urusan pemerintahan. 14. Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi neutralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya. 15. Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan.

UU 2/2014 revisi 30/2004JN

1 (1): Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

1 (7). Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

1(13). Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU 11/2008 + PP 82/2012

Ps. 69 => notaris dapat menunjang LSK
Ps 59 (5) =>

Pasal 15

(1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. membuat Akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

UU 30/2014 Administrasi Pemerintahan

- BAB VII PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Bagian Keempat Keputusan Berbentuk Elektronik
- (Pasal 38)

- (1) Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan dapat membuat Keputusan Berbentuk Elektronik.
- (2) Keputusan Berbentuk Elektronik wajib dibuat atau disampaikan apabila Keputusan tidak dibuat atau tidak disampaikan secara tertulis.
- (3) Keputusan Berbentuk Elektronik berkekuatan hukum sama dengan Keputusan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya Keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan.
- (4) Jika Keputusan dalam bentuk tertulis tidak disampaikan, maka yang berlaku adalah Keputusan dalam bentuk elektronik.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan antara Keputusan dalam bentuk elektronik dan Keputusan dalam bentuk tertulis, yang berlaku adalah Keputusan dalam bentuk tertulis.
- (6) Keputusan yang mengakibatkan pembebanan keuangan negara wajib dibuat dalam bentuk tertulis.

Catatan: Bagaimana keautentikan dokumen dari keputusan administrasi Negara secara elektronik

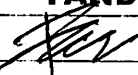
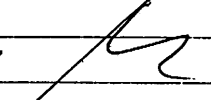
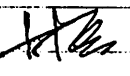


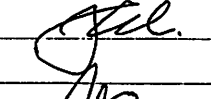

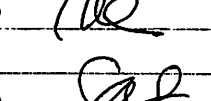
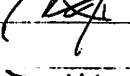
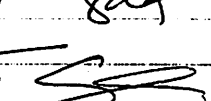
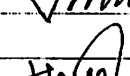
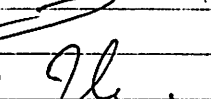
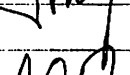

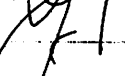
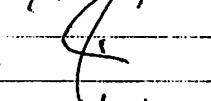
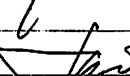

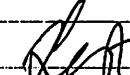
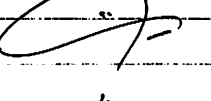
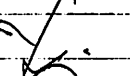
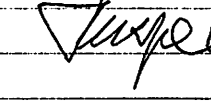
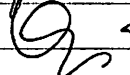


Pasal 38

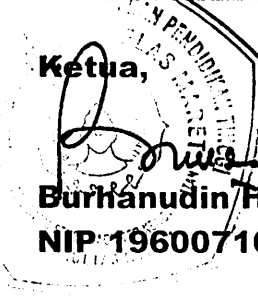
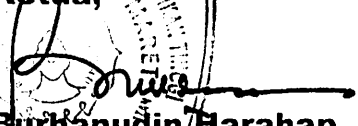
Ayat (1) Prosedur penggunaan Keputusan Berbentuk Elektronik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik.

Ayat (2) Untuk proses pengamanan pengiriman Keputusan, dokumen asli akan dikirimkan apabila dibutuhkan penegasan mengenai penanggung jawab dari Pejabat Pemerintahan yang menyimpan dokumen asli. Jika terdapat permasalahan teknis dalam pengiriman dan penerimaan dokumen secara elektronik baik dari pihak Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Warga Masyarakat, maka kedua belah pihak saling memberitahukan secepatnya.

- Ayat (3)** Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (6) Cukup jelas.

**DAFTAR HADIR SEMINAR NASIONAL
 "CYBER NOTARY DALAM PERSPEKTIF UJUN DAN HUKUM
 PEMBUKTIAN" MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNS
 SURAKARTA, 6 JUNI 2015**



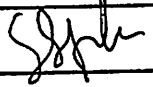
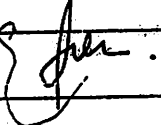

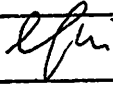
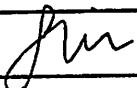


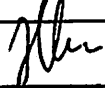
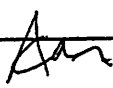




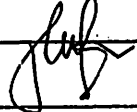
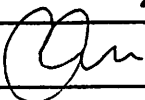

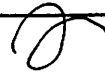




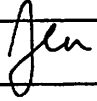
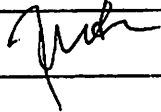
NO	NAMA PESERTA	TANDA TANGAN
276	FAJAR BUDIANTO	276 
277	GALANG GESIT	277 
278	HARRI SAPTO PRAYOGO	278 
279	DIAN SARI TRI ASHARI	279 
280	JEFRY SARAGIH	280 
281	JATMIKO	281 
282	NIAR JUNIANTI	282 
283	MUSTIKA MANDASARI	283 
284	MAHARANI PUTRI	284 
285	SATRIYA DEWANTO	285 
286	SUSILO PRANOTO	286 
287	SENDY CLAUDIA	287 
288	TRI AYU PRATIWI	288 
289	ULFA MARIA NOVA	289 
290	WENDY PURNOMO	290 
291	NOOR SAPTANTI, SH.MH	291 
292	WAHYU NUGROHO, SH MH	292 
293	MUH. ALI FAUZI, SH	293 
294	DIAN PRATIWI	294 
295	KRISTIN WIDOWATI	295 
296	SULASMI, SPd	296 
297	WARDIYANTO, SH, MH	297 
298	YURISMA TAUFIQ, SE	298 
299	ARJID NABLA	299 
300	GRAHANI WAHYU WIDHYASTUTI	300 


Ketua,

Burhanudin Harahap, SH, MH, MSI, Ph.D
NIP 196007161985031004

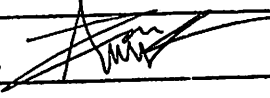


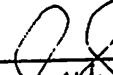

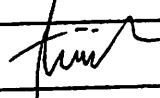
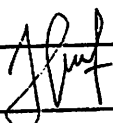

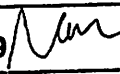
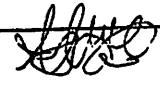
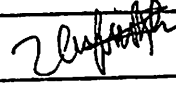

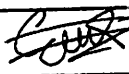

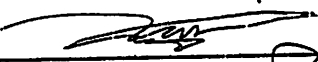
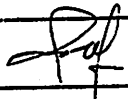
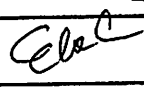
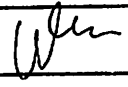
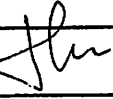
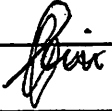
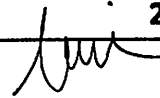
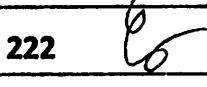
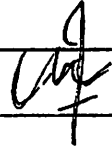

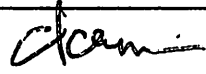
**DAFTAR HADIR SEMINAR NASIONAL
 "CYBER NOTARY DALAM PERSPEKTIF UUN DAN HUKUM PEMBUKTIAN"
 MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNS
 SURAKARTA, 6 JUNI 2015**

NO	NAMA PESERTA	TANDA TANGAN
251	ARGA ARDINATO	251 <i>Arga</i>
252	ARYA KUSUMA DEWA	252 <i>Ka</i>
253	ARYO HARYANTO	253 <i>Haryo</i>
254	ARISTA KURNIA	254 <i>Pusta</i>
255	ANGGIT BAGASWORO	255 <i>Anggit</i>
256	AGNESIA MONICA	256 <i>Monic</i>
257	AGUNG PAMBUDI	257 <i>Agung</i>
258	ANGGUN ANGGITA	258 <i>Anggun</i>
259	ASTUTI PUTRI HANDAYANI	259 <i>Astuti</i>
260	ARISANDI	260 <i>Sandi</i>
261	BAGUS ADI NUGROHO	261 <i>Bagus</i>
262	BUDI GUNAWAN	262 <i>Budi</i>
263	BENI BAGASKARA	263 <i>Beni</i>
264	CITRA WULANDARI	264 <i>Citra</i>
265	CAHYANI ARUM	265 <i>Cahya</i>
266	CANTIKA ELISA PUSPITA	266 <i>Cantik</i>
267	CHABIB MUKTI	267 <i>Chabib</i>
268	DAMAR ARYA TIRTA LINGGA	268 <i>Damar</i>
269	DIKA PRAMESWARI	269 <i>Dika</i>
270	EMILIA ELMA	270 <i>Emilia</i>
271	EVANGELINE ECHA	271 <i>Evangeline</i>
272	ELSA TRY GURETNA	272 <i>Elsa</i>
273	ERY GLADISMA	273 <i>Ery G.</i>
274	ENJANG MAHARANI	274 <i>Enjang</i>
275	EVITA KUSUMAWARDANI	275 <i>Evita</i>

**DAFTAR HADIR SEMINAR NASIONAL
 "CYBER NOTARY DALAM PERSPEKTIF UJUN DAN HUKUM PEMBUKTIAN"
 MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNS
 SURAKARTA, 6 JUNI 2015**

NO	NAMA PESERTA	TANDA TANGAN
226	AGUSTIN FITRIA NELAWATI, SH., M.Kn	226 
227	BAGUS ADYASTAMA P.H.	227 
228	ENDANG SAPTITI TRISNO YULIATI, SH., M.Kn	228 
229	ERA YUSTIKA ADILLAH, SH., M.Kn	229 
230	IRENE VERA PURBA, SH	230 
231	PRITHA ANGGRAINI, SH.,M.Kn	231 
232	SRI SURYANTINI, SH	232 
233	SUPARNO, SH.,M.Kn	233 
234	dr. SURYO WAHYU RAHARJO	234 
235	NUR AMIN SOLIKHAH, SH., M.Kn	235 
236	AANG KUNAEFI, SH	236 
237	PRATAMA YUDHA SAKTI, SH	237 
238	INDIRA PUTRI IRFANI	238 
239	YB IRPAN	239 
240	IDHA PUDJI HASTUTI, SH	240 
241	TRRISCHA VIDIA KUSUMA	241 
242	GLADYS OCTAVIAADYA	242 
243	WHENAHYU TEGUH PUSPA	243 
244	ALI ARIFIN	244 
245	BUDIMAN R.	245 
246	ANITA H.	246 
247	JOHAN ANWAR	247 
248	RAHMAT H.	248 
249	LARASATI WAHYU	249 
250	BONDA	250 

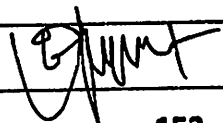
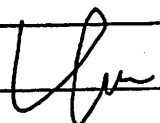
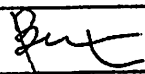
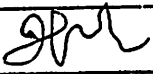
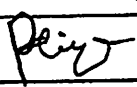
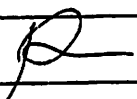
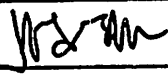
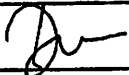
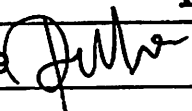

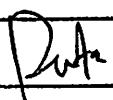
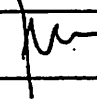
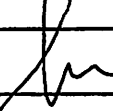
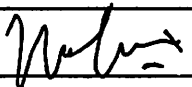
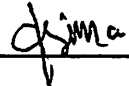
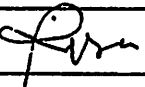
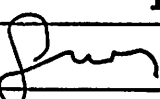

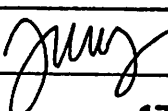
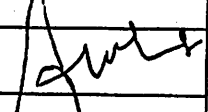
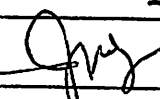
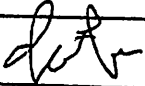
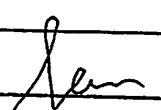
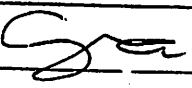
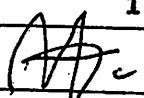
**DAFTAR HADIR SEMINAR NASIONAL
 "CYBER NOTARY DALAM PERSPEKTIF UJUN DAN HUKUM PEMBUKTIAN"
 MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNS
 SURAKARTA, 6 JUNI 2015**

NO	NAMA PESERTA	TANDA TANGAN
201	AQLITA BINTANG MURTIKASARI	201 
202	DEA NISA AKUM HERLANDIPURA	202 
203	DENIK SHALIAH	203 
204	DESTRI WAHYU UTAMI	204 
205	DZAKIA ESTI PURWITASARI	205 
206	FIQIH DEA YULIANDA	206 
207	KIMDAENI	207 
208	MYRA KARTINI BUJUNG	208 
209	NURUL HASNADA	209 
210	SARAH MEILITA INDRANI	210 
211	YUZZINIZAR KUSUMANINGTYAS	211 
212	ANNISA AMELIA	212 
213	TENRISANA	213 
214	RADITYA UTAMA	214 
215	WIDA RIA SANJAYA	215 
216	FET CHAN LUWESI	216 
217	ENDAH SAPTINI	217 
218	WAKHID NUGROHO ASRI	218 
219	PRATAMA YUDHA SAKTI	219 
220	ROBERTUS BIMA WAHYU MAHARDIKA	220 
221	AGUSTA PINTA KURNIA RIZKY, SH, M.Kn	221 
222	SUSILOWATI	222 
223	WISNU ADI NUGRAHA	223 
224	ANANG WICAKSONO	224 
225	PRABOWO CAHYANDARU	225 

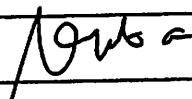
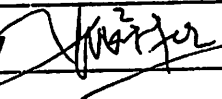
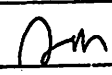

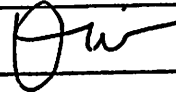

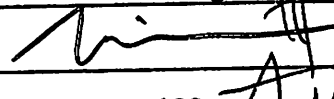
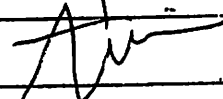
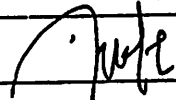
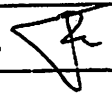
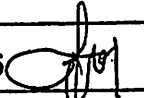

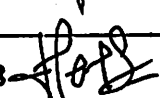

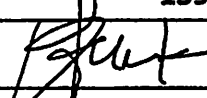
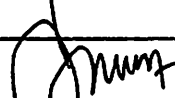


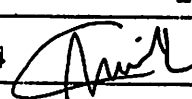
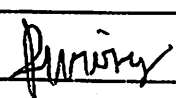
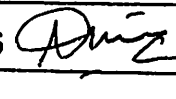
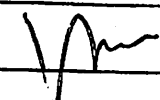
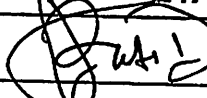
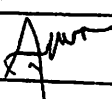
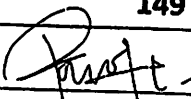
**DAFTAR HADIR SEMINAR NASIONAL
 "CYBER NOTARY DALAM PERSPEKTIF UJUN DAN HUKUM PEMBUKTIAN"
 MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNS
 SURAKARTA, 6 JUNI 2015**

NO	NAMA PESERTA	TANDA TANGAN
176	STELLA KIRANA N.P.	176
177	STEVIE PUTRA SAMUDRA, SH	177
178	SUGENG RIYANTA, SH.,MH	178
179	TESALONIKA MARTA A.,SH	179
180	TIKA NURMALASARI, SH	180
181	TITRISIA PARAMITA, SH	181
182	TRIANAN WARDANI	182
183	TRİYANTI	183
184	TRİYANTO SETYO P., SH	184
185	UMI NOOR JANNAH	185
186	UMU AFIFAH	186
187	WAHYU HASRIO NASUTION, SH	187
188	WAHYU TRI UTAMI, SH	188
189	WAHYUNI, SH	189
190	WIDI NUGRAHANINGSIH, SH	190
191	WIDIARTO AGUNG SANTOSO, SH	191
192	WURYANTI, SH	192
193	YAN LIA WIDIASTUTI, SH	193
194	YANUAR ARIFIN, SH	194
195	YOHANA DEA	195
196	YOLANDA SHANTY DEWI, SH	196
197	YULIA FITRI RACHMASARI, SH	197
198	YULIANA, SH	198
199	ZULFACHRI, SH	199
200	ARIF SYANHI	200

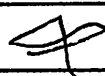
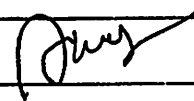
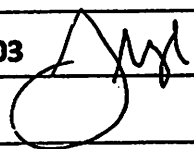
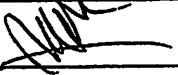
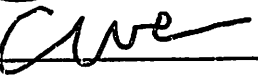
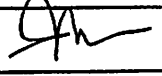
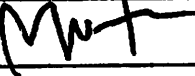
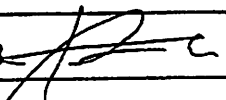
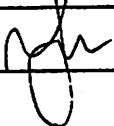
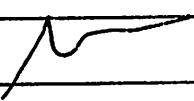
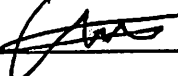
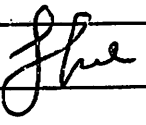
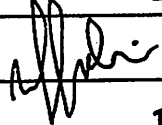

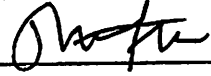
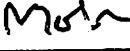


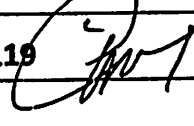

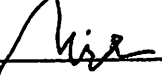
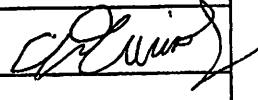
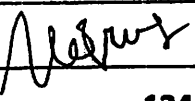

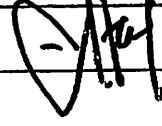
DAFTAR HADIR SEMINAR NASIONAL
"CYBER NOTARY DALAM PERSPEKTIF UJUN DAN HUKUM PEMBUKTIAN"
MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNS
SURAKARTA, 6 JUNI 2015

NO	NAMA PESERTA	TANDA TANGAN
151	RENNY LISTIANIFA, SH	151 
152	RESTIKA PRAHANELA	152 
153	RETNO BUNGA W., SH	153 
154	RETNO ISMINDARI, SH	154 
155	RETNO PUSPO DEWI, SH	155 
156	RETNO PUTRI WIJAYANTI	156 
157	RIA RUSTIANI	157 
158	RIFZKI DHIAN PRAMUVTI, SH	158 
159	RIKO WAHYU BIMA A., SH	159 
160	RINDI PRIMA, SH	160 
161	RITA WIDYAWATI, SH	161 
162	RIZKI SRI INDRAYUDA, SH	162 
163	RIZKY SEPTIAN HERI, SH	163 
164	RIZKY WULANDARI, SH	164 
165	RIZQI PERMATA NUZULA, SH	165 
166	ROSYANA AMILIA SIREGAR, SH	166 
167	SARI	167 
168	SARI RABİYANTI, SH	168 
169	SATYA HAPRABU	169 
170	SHALAHUDDIN AL AYOUGI, SH	170 
171	SINCE IRIANI THEDY, SH	171 
172	SITI DESTYA NURAHMA, SH	172 
173	SLAMET RIYANTO	173 
174	SRI HANDAYANI	174 
175	SRI UTAMI, SH	175 

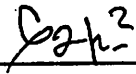

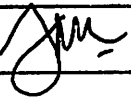
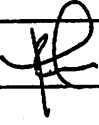
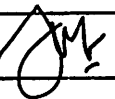




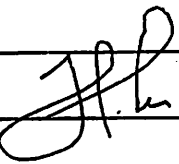



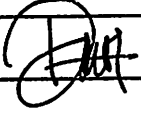

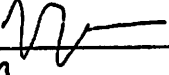

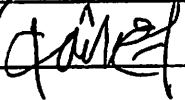
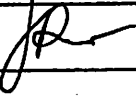


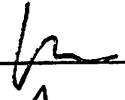


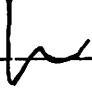
**DAFTAR HADIR SEMINAR NASIONAL
 "CYBER NOTARY DALAM PERSPEKTIF UJUN DAN HUKUM PEMBUKTIAN"
 MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNS
 SURAKARTA, 6 JUNI 2015**

NO	NAMA PESERTA	TANDA TANGAN
126	NOVITA PURWANTI	126 
127	NUNIK	127 
128	NUR ADI KUMALADEWI, SH	128 
129	NURAINY OCTARIA, SH	129 
130	OKY DITYA ARGO PUTRA	130 
131	PENNY YULI ASTUTI	131 
132	PETRUS BENY PRABOWO	132 
133	PIAND	133 
134	PRANCISCA ROMANA DWI HASTUTI, SH	134 
135	PRISILIA PURWADHANI, SH	135 
136	PUSPITA AYU MANDASARI	136 
137	PUTRI DWI PRASETYO UTAMI, SH	137 
138	PUTRI PARAMITA	138 
139	PUTU ERNAWATI PUTRI, SH	139 
140	QOMARUZZAMAN, SH	140 
141	RACHMADEWI DESTRIA RIZKY, SH	141 
142	RADO SAHTANTRA, SH	142 
143	RAHAJENG SEKAR W.	143 
144	RAHMA RAHADIANING AZMI, SH	144 
145	RAHMANI EKA PUTRI	145 
146	RAHMAT RIZQON NOVIANDRI, SH	146 
147	RAHMATIKA, SH	147 
148	RATNA DYAH PURWANINGSIH, SH	148 
149	RENDY PERMATA DENTA, SH	149 
150	RENGGANI KUSUMASTUTI	150 

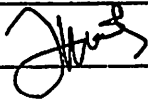



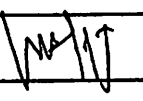


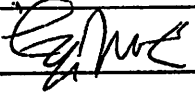
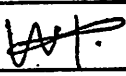



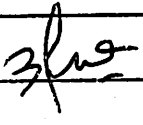
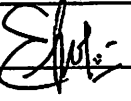

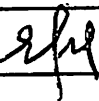
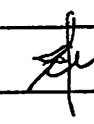
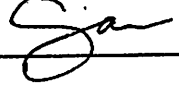
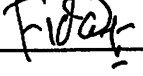

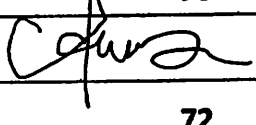


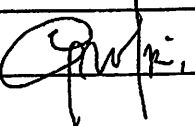

**DAFTAR HADIR SEMINAR NASIONAL
 "CYBER NOTARY DALAM PERSPEKTIF UJUN DAN HUKUM PEMBUKTIAN"
 MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNS
 SURAKARTA, 6 JUNI 2015**

NO	NAMA PESERTA	TANDA TANGAN
101	LISA NURITA PUTRI, SH	101 
102	LUCKY, SH	102 
103	LUKY PANGASTUTI, SH	103 
104	LUPITA MAXELLIA, SH	104 
105	M. INDRA WAHYU ADHITYA BAGAN, SH	105 
106	MANGILIWATI WINARDI, SH	106 
107	MARIA ANGGITA DIAN PRAMESTIE, SH	107 
108	MARIA PUSPA ROSARI, SH	108 
109	MARLENA	109 
110	MAS MOCHAMMAD SYAUQI ALAIK, SH	110 
111	MEISKA VERANITA, SH	111 
112	MELLISA MAYANG, SH	112 
113	MEYLDA MASJITA, SH	113 
114	MILA	114 
115	MITA ARDIANTI, SH	115 
116	MOHAMAT RIZA K.,SH	116 
117	MUH. FIRMAN A.B.	117 
118	MUHAMAD JODI S., SH	118 
119	MUHAMMAD ARDIE SURYO KESUMO, SH	119 
120	MUHAMMAD AS. ARI. AM	120 
121	NADIAH CYNTHIA RACHMA	121 
122	NI WAYAN ADIANI, SH	122 
123	NONIS AGENG MAHARANI, SH	123 
124	NOOR ARINI HAQ, SH	124 
125	NOOR SAPTANTI, SH., MH	125 



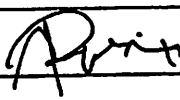


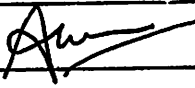
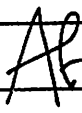

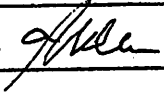

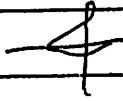
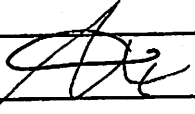


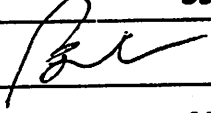
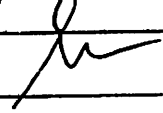




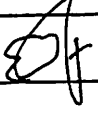
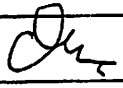

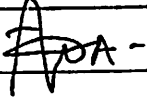
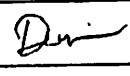
**DAFTAR HADIR SEMINAR NASIONAL
 "CYBER NOTARY DALAM PERSPEKTIF UJUN DAN HUKUM PEMBUKTIAN"
 MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNS
 SURAKARTA, 6 JUNI 2015**

NO	NAMA PESERTA	TANDA TANGAN
76	GALIH CAKRA WIGUSTA, SH	76 
77	GEMARANI HARSARI, SH	77 
78	H.I MADE ERWAN ADYANA PUTRA, SH	78 
79	HAFIDHAH NOVI P., SH	79 
80	HANANTO ADI, SH	80 
81	HARI NOOR YASIM	81 
82	HARIS NOVY ADMADIANTO, SH	82 
83	HENDRI BUDIYANTO, SH	83 
84	HERI FIKRY SAPTOTO, SH	84 
85	HERU SUPARNO	85 
86	HESTI KUSUMA WARDHANI, SH	86 
87	HOLY OKTAVIANI PUTRI, SH	87 
88	I GUSTI NGR HADI PURNAMA PUTERA, SH	88 
89	I MADE DWIPAYANA ADI PUTRA, SH	89 
90	IDA AYU MADE SUTRAYENI, SH	90 
91	IKSAN	91 
92	INCHE D.P. SAYUNA	92 
93	INTANIA Z.F.	93 
94	IRFANUDIN, SH	94 
95	KHALID, S.Ag.,SH.,M.Hum	95 
96	KUNCORO SIDI, SH	96 
97	KUSUMO NINDITO	97 
98	LALA	98 
99	LAURINA SANDRA, SH	99 
100	LILIN ROYANI, SH	100 

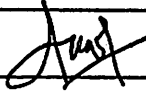

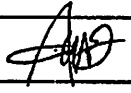
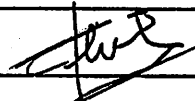
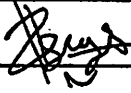




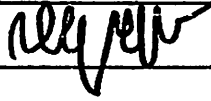
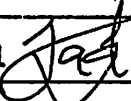
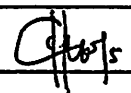




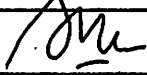

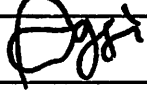
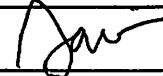


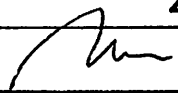
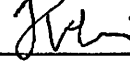
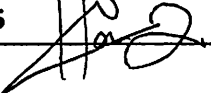
DAFTAR HADIR SEMINAR NASIONAL
"CYBER NOTARY DALAM PERSPEKTIF UJUN DAN HUKUM PEMBUKTIAN"
MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNS
SURAKARTA, 6 JUNI 2015

NO	NAMA PESERTA	TANDA TANGAN
51	DEVIANI PUJIASTUTI PANGULU, SH	51 
52	DEWA ADHI KUSUMA	52 
53	DIAN CAHAYANI, SH	53 
54	DIAN PRATIWI	54 
55	DOROTEA LEMANUK, SH	55  (Duf)
56	DWI HASTUTI, SH	56 
57	DWI WAHYU JULIYANTO	57 
58	EFFENDI UTOMO	58 
59	EFI HANTARA	59 
60	EKA ANDRI PRASETYO, SH	60 
61	EKO SETYO PAMBUDI	61 
62	ELIS RAKHMAWATI	62 
63	ELMAVIRNA CALVIRA, SH	63 
64	ENDAH RETNO SARASWATI	64 
65	ERDHYAN PARAMITA, SH	65 
66	EVIE HANAVIA, SH	66 
67	FAHMA, SH	67 
68	FAISAL SETIYADI, SH	68 
69	FARIDA KUSUMASTUTIK, SH	69 
70	FARIED MUHAMMAD YAMIN	70 
71	FATMAWATI, SH	71 
72	FEBRIANTO HENDRA W, SH	72 
73	FICO ALDEFRA, SH	73 
74	GAGAS IDHI PRASTITI, SH	74 
75	GALAH	75 

**DAFTAR HADIR SEMINAR NASIONAL
 "CYBER NOTARY DALAM PERSPEKTIF UJUN DAN HUKUM PEMBUKTIAN"
 MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNS
 SURAKARTA, 6 JUNI 2015**

NO	NAMA PESERTA	TANDA TANGAN
26	ARFIANTI, SH	26 
27	ARI NANKANTI PURBATI, SH	27 
28	ARIF BUDI PRASTAWA, SH	28 
29	ARIFIN BACHTER, SH	29 
30	ARRIS WIBAWA, SH	30 
31	ARSETO, SH	31 
32	ASRI ARINDA, SH	32 
33	ASTRI ALMIRA RAHMA, SH	33 
34	ASTRID PARAMITA, SH	34 
35	ATIK PRIHARTATIK, SH	35 
36	ATIKA	36 
37	ATINA WULANDARI	37 
38	AYU MUSTIKA WATI, SH	38 
39	AYU RATNAWATI	39 
40	Ir. BAMBANG S. WIDJANARKO, M.Sp	40 
41	BETTA TRIYANTO, SH	41 
42	BONIFACIUS HUGO UDANANTO, SH	42 
43	BUDI PURNOMO, SH	43 
44	CHERRYS JELA JELA, SH	44 
45	CHRISTINA WATI B.R.T, SH	45 
46	DEDY ZAENAL, SH	46 
47	DENNY SULISTYONINGSIH, SH	47 
48	DENY MURIA HINDRATO, SH	48 
49	DESTAMIA MUTIARA ARRUUM, SH	49 
50	DEVI NURMALA SARI, SH	50 

**DAFTAR HADIR SEMINAR NASIONAL
"CYBER NOTARY DALAM PERSPEKTIF UJUN DAN HUKUM PEMBUKTIAN"
MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNS
SURAKARTA, 6 JUNI 2015**

NO	NAMA PESERTA	TANDA TANGAN
1	A'AN TIANLAJANU, SH	1 
2	ADHYA HANAFI, SH	2 
3	ADI NUGRAHA MULIA, SH	3 
4	ADITYA ANGGI PAMUNGKAS, SH	4 
5	ADITYO BAYU, SH	5 
6	ADYA PARAMITA PRABANDARI, SH, M.Li, MH	6 
7	AFRA TARADIPA SUMARSONO, SH	7 
8	AGAM MORISCO	8 
9	AGENG MARTA, SH	9 
10	AGUNG WIDODO, SH, S.Sos	10 
11	AGUSTINUS DANAN, SH	11 
12	ALFITRI SETYANINGRUM, SH	12 
13	ALVIN YAHYA	13 
14	ANANDA FITKI AYU S, SH	14 
15	ANDHIKA DESY FLUITA	15 
16	ANDINA DAMAYANTI S, SH	16 
17	ANDRE BAGUS Y., SH	17 
18	ANDRIYANTO DWI SETYAWAN, SH	18 
19	ANGGITA SUKMA DEBTY, SH	19 
20	ANGGRAINI PUSPITA S., SH	20 
21	ANISETIAWAN ARIN W., SH	21 
22	ANITA ZULFIANI, SH.,M.Hum	22 
23	ANJAR SRI CIPTORUKMI N., SH.,M.Hum	23 
24	ANNISYA OKTARI, SH	24 
25	APRILLIA HANASTUTI	25 

Bab IV bagian ke VI- Legalisasi Dokumen:
Pasal 73

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan berwenang untuk melegalisasi salinan/fotokopi dokumen Keputusan yang ditetapkan.
- (2) Legalisasi salinan/fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain yang diberikan wewenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pengabsahan oleh notaris.
- (3) Legalisasi Keputusan tidak dapat dilakukan jika terdapat keraguan terhadap keaslian isinya.
- (4) Tanda Legalisasi atau pengesahan harus memuat:
 - a. pernyataan kesesuaian antara dokumen asli dan salinan/fotokopinya; dan
 - b. tanggal, tanda tangan pejabat yang mengesahkan, dan cap stempel instansi atau secara notarial.
- (5) Legalisasi salinan/fotokopi dokumen yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan tidak dipungut biaya.

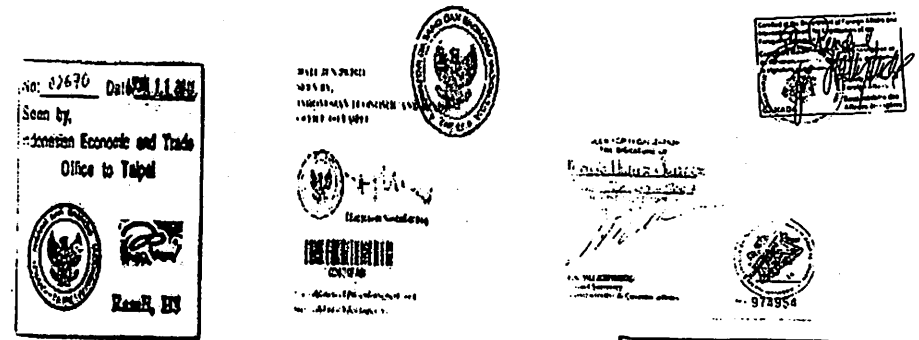
Pasal 74

- (1) Keputusan wajib menggunakan bahasa Indonesia.
- (2) Keputusan yang akan ditelegalisasi yang menggunakan bahasa asing atau bahasa daerah terlebih dahulu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (3) Penerjemahan wajib dilakukan oleh penerjemah resmi.

Legalisasi

Pasal 73

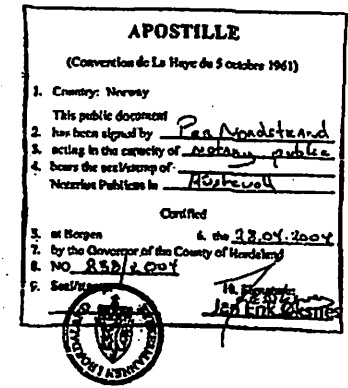
- Ayat (1) Yang dimaksud dengan "salinan/fotokopi" adalah termasuk juga copy collationee.
- Ayat (2) Yang dimaksud dengan "dokumen" adalah setiap informasi yang terdokumentasi dalam bentuk tertulis atau bentuk elektronik yang dikuasai oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
- Kewenangan notaris untuk mengesahkan dokumen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ayat (3) Yang dimaksud dengan "terdapat keraguan" adalah karena robek, penghapusan kata, angka dan tanda, perubahan, kata-kata yang tidak jelas terbaca, penambahan atau hilangnya lembar halaman yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen.
- Ayat (4) Cukup jelas.
- Ayat (5) Cukup jelas.
- Pasal 74 Cukup jelas.



Apakah Legalisasi dapat menjelaskan keotentikan suatu dokumen ..???

dan

Apakah legalisasi dapat melepaskan syarat kejelasan identitas subyek hukum ..???



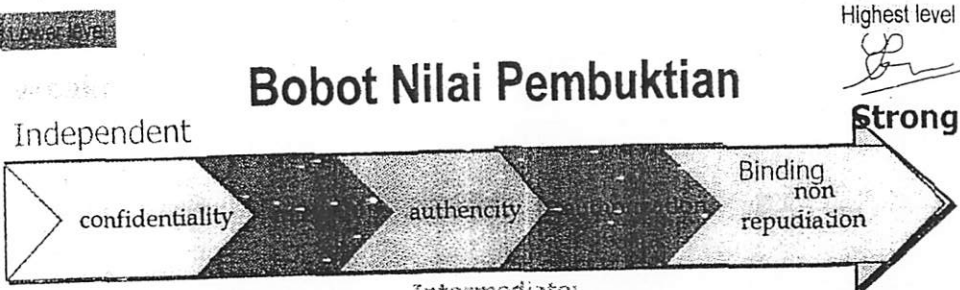
Pertanyaan Yang Mendasar

- Apakah yang dimaksud dengan keotentikan itu
- Bagaimana dan Siapa yang menjamin keotentikan itu...?
- Sesuai Kamus, maka "legal" <=> sesuai hukum, sementara "authentic" <=> original/genuine
- Pengertian umum ttg keotentikan:
 - Tertulis, bertanda tangan, asli dan dibuat oleh pejabat yg berwenang
- Perspektif perdata:
 - Bukti Tulisan => apakah hanya tinta di atas kertas saja ?
 - tidak bertanda-tangan => surat
 - Bertandatangan =>
 - Akta Bawah tangan => hanya para pihak saja
 - Akta Otentik => Dibuat oleh atau Dihadapan pejabat
- Apakah ada alat yang menjamin adanya keotentikan => kriptografi

Traditional authenticity vs e-Authentication

Paperbased	Electronic-based <i>(functional equivalent approach)</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Writing (Tertulis) • Signed (Bertanda-tangan) • Original (asli, tak berubah) 	<ul style="list-style-type: none"> • Apa yang telah dituliskan/disimpan dpt ditemukan kembali • Terdapat informasi yang menemukan Subyek Hukum Yang bertanggung jawab • Apa yang tersimpan dan ditemukan tidak ada perubahan (terjamin keutuhannya).
<ul style="list-style-type: none"> • In commercial perspective <ul style="list-style-type: none"> • Signed above on the duty stamped (evidential purposive) • Public Document <ul style="list-style-type: none"> • Physical Appearance plus Signed by Government Officer 	<ul style="list-style-type: none"> • e-registry + e-filing • Automated Clearing House • Repository Public Document • Credential system • Access to e-ID
<ul style="list-style-type: none"> • Formal Requirement • kehadiran fisik pihak secara langsung penghadap dengan notaris (ps. 16 ayat (1) huruf l) • pembacaan akta dihadapan para pihak dan para pihak mengerti, kecuali bila para pihak tidak minta untuk dibacakan (ps. 16 ayat (7)) • kehadiran dan tanda tangan para saksi-saksi yang tidak mempunyai hubungan darah atau perkawinan, kecuali bila ditentukan lain oleh UU (ps.39 dan 40) • para para pihak, saksi dan notaris pada setiap halaman sebagai tindakan persetujuan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Material/Substantial Requirement: <ul style="list-style-type: none"> • CIANA • Supporting evidence that formal had already done • There is a guarantee that the Party and The Government officer should be avoided from the Conflict of Interest • Traceable

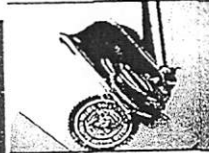




	Intermediate:				
Lemah	X	X	X	X	X
Intermediate	√	√	√	√	X
Kuat	√	√	√	√	√

Functional equivalent Approach:

- Writing
- Signed
- original



OECD Guidance e-Authentication


• Authentication in Context

- Authentication can mean a variety of things depending on the context in which the term is used. An Internet search on the term "authentication" yields a very broad range of definitions, some addressing authentication of persons or other entities, others addressing things, documents and systems. Across these definitions, authentication is accomplished through processes that have various degrees of detail and technical specificity. These processes are aimed at determining whether someone or something is, in fact, who or what it claims to be. As such, effective authentication is a key contributor to the establishment of a trust relationship in a digital environment. For the purposes of this guidance, authentication is defined as:
 - A function for establishing the validity and assurance of a claimed identity of a user, device or another entity in an information or communications system.
- This definition implies two processes and one result:
 - A claim related to a person, other entity or thing is presented (claiming process).
 - That claim is substantiated (substantiation process).
 - As a result, a degree of confidence, or lack thereof, in the claim is generated.

UNCITRAL:

e-Authentication = E-signatures

- In some cases, the expression "electronic authentication" is used to refer to techniques that, depending on the context in which they are used, may involve various elements, such as:
 - identification of individuals,
 - confirmation of a person's authority (typically to act on behalf of another person or entity) or
 - prerogatives (for example, membership in an institution or subscription to a service) or
 - assurance as to the integrity of information.
- In some cases, the focus is on identity only, but sometimes it extends to authority, or a combination of any or all of those elements.

	Legalization	Authentic
Free online dictionary	<p>le-gal-ize (lə'gə-līz) /r.v. le-gal-ized, le-gal-iz-ing, le-gal-iz-es To make legal or lawful; authorize or sanction by law. le-gal-i-za'tion (-gə-lī-zā'shən) n.</p> <p>adjective: legal</p> <p>1. of, based on, or concerned with the law. "the American legal system" appointed or required by the law. "a legal requirement"</p> <p>synonyms: <i>within the law, legalized, permitted, More allowed, sanctioned, informal</i> "the legal sale of alcoholic beverages" antonyms: <i>of or relating to theological legalism.</i></p> <p>Law recognized by common or statutory law, as distinct from equity. (of paper) measuring 8 1/2 by 14 inches.</p> <p>2. permitted by law. "he claimed that it had all been legal"</p> <p>synonyms: <i>within the law, legalized.</i></p>	 <p>adjective: authentic; adjective: auth.</p> <p>1. of undisputed origin; genuine. "the letter is now accepted as an authentic document"</p> <p>synonyms: <i>More</i> "an authentic document" antonyms: <i>made or done in the traditional or original way, or in a way that faithfully resembles an original.</i></p> <p>"the restaurant serves authentic Italian meals" based on facts; accurate or reliable.</p> <p>"an authentic depiction of the situation"</p> <p>synonyms: <i>More</i> "an authentic depiction of the situation" antonyms: <i>(in existentialist philosophy) relating to or denoting an emotionally appropriate, significant, purposive, and responsible mode of human life.</i></p> <p>2. Music (of a church mode) comprising the notes lying between the principal note or final and the note an octave higher. Origin</p>
Oxford	<p>Full Definition of LEGALIZE</p> <p>: to make <i>especially</i>: to give legal validity or sanction to</p> <p>— le-gal-i-za-tion noun</p> <p>— le-gal-iz-er noun</p> <p>Examples of LEGALIZE</p> <p>They wanted to legalize gambling in their city.</p> <p>The government has legalized the use of the new drug.</p>	<p>1 obsolete :</p> <p>2 a : worthy of acceptance or belief as <i>to or based on fact</i> <paints an authentic picture of our society></p> <p>b : conforming to an original so as to reproduce essential features <an authentic reproduction of a colonial farmhouse></p> <p>c : made or done the same way as an original <authentic Mexican fare></p> <p>3 : not false or <i><an authentic cockney accent></i></p> <p>4 a of a church mode : ranging upward from the <i>— compare</i></p> <p>1 b of a cadence : progressing from the dominant chord to the <i>— compare</i> 2</p>

Informasi Publik (UU 14/2008)	Dokumen Publik (Hague Agreement 1961)
<p>Pasal 1 angka (2) UU-KIP:</p> <p>Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.</p>	<p>Article 1</p> <p>The present Convention shall apply to public documents which have been executed in the territory of one Contracting State and which have to be produced in the territory of another Contracting State. For the purposes of the present Convention, the following are deemed to be public documents:</p> <ol style="list-style-type: none"> documents emanating from an authority or an official connected with the courts or tribunals of the State, including those emanating from a public prosecutor, a clerk of a court or a process-server ("huissier de justice"); administrative documents; notarial acts; official certificates which are placed on documents signed by persons in their private capacity, such as official certificates recording the registration of a document or the fact that it was in existence on a certain date and official and notarial authentications of signatures. <p>However, the present Convention shall not apply:</p> <ol style="list-style-type: none"> to documents executed by diplomatic or consular agents; to administrative documents dealing directly with commercial or customs operations.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ⇔ e-Gov ... ?

Perpres 47/2015 (29 April 2015)

Pasal 13: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- perumusan kebijakan di bidang kelembagaan pemerintahan;
- perumusan kebijakan di bidang ketatalaksanaan pemerintahan, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dan pengembangan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan pemerintahan;
- koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang ketatalaksanaan pemerintahan, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dan pengembangan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan pemerintahan;
- pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketatalaksanaan pemerintahan, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dan pengembangan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata laksana; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Perpres 54/2015 (4 mei 2015)

Pasal 16: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktorat Jenderal Aptika menyelenggarakan fungsi:

- perumusan kebijakan di bidang penatakelolaan e-Government, e-Business, dan keamanan informasi, peningkatan teknologi dan infrastruktur aplikasi informatika serta pemberdayaan informatika;
- pelaksanaan kebijakan di bidang penatakelolaan e-Government, e-Business, dan keamanan informasi, peningkatan teknologi dan infrastruktur aplikasi informatika serta pemberdayaan informatika;
- penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penatakelolaan e-Government;
- pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penatakelolaan e-Government;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penatakelolaan e-Government, e-Business, dan keamanan informasi, peningkatan teknologi dan infrastruktur aplikasi informatika serta pemberdayaan informatika;
- pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

E-Identity Management => e-KTP ?

Ps.6 ayat (1) & (2) Perpres 35/2010 (rev 26/2009) ttg e-KTP:

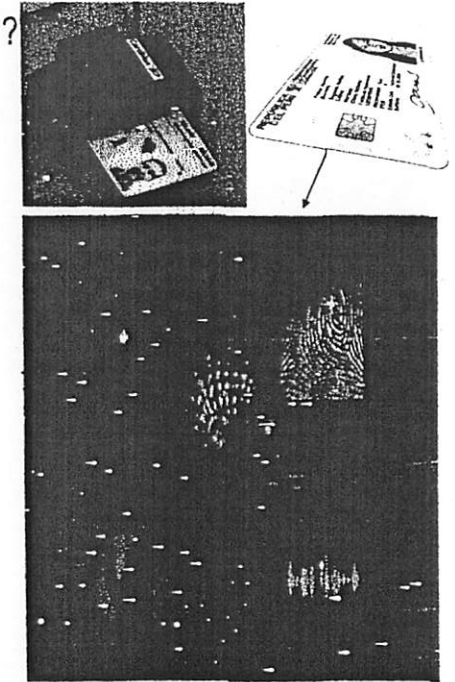
KTP berbasis NIK memuat Kode Keamanan dan Rekaman Elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk. Kode keamanan adalah alat identifikasi jati diri yang menunjukkan identitas diri penduduk secara tepat dan akurat sebagai autentikasi diri yang memastikan dokumen kependudukan sebagai milik orang tersebut.

Rekaman Elektronik berisi:

- biodata,
- tanda tangan,
- pas photo, dan
- sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan.

2nd Generation:

- Digital certificate
- application => public services & ecommerce



Digital Certificate

Public Key of Arnold (signature)

You can store into smartcard or Disk

Information after

eSignature:

Notary E. Sall

Commencement of validity

Digitally signed by ACES Business Test Cert
 DN: c=US, o=DST ACES Business Representative, ou=IDENTRUST, cn=ACES Business Test Cert,
 0.9.2342.19200300.100.1.1=AD1096A.00000
 11F15576689000028F9
 Date: 2009.10.28 10:00:45 -04'00'

Root CA ← Cross Recognition → Root CA

SUB CA 1, SUB CA 1, SUB CA 1, SUB CA 1

How to Trust

In this hierarchical certificate model, a trust anchor (Root CA) is used to verify other certificates. The trust anchor is a certificate that is trusted by all other certificates in the hierarchy.

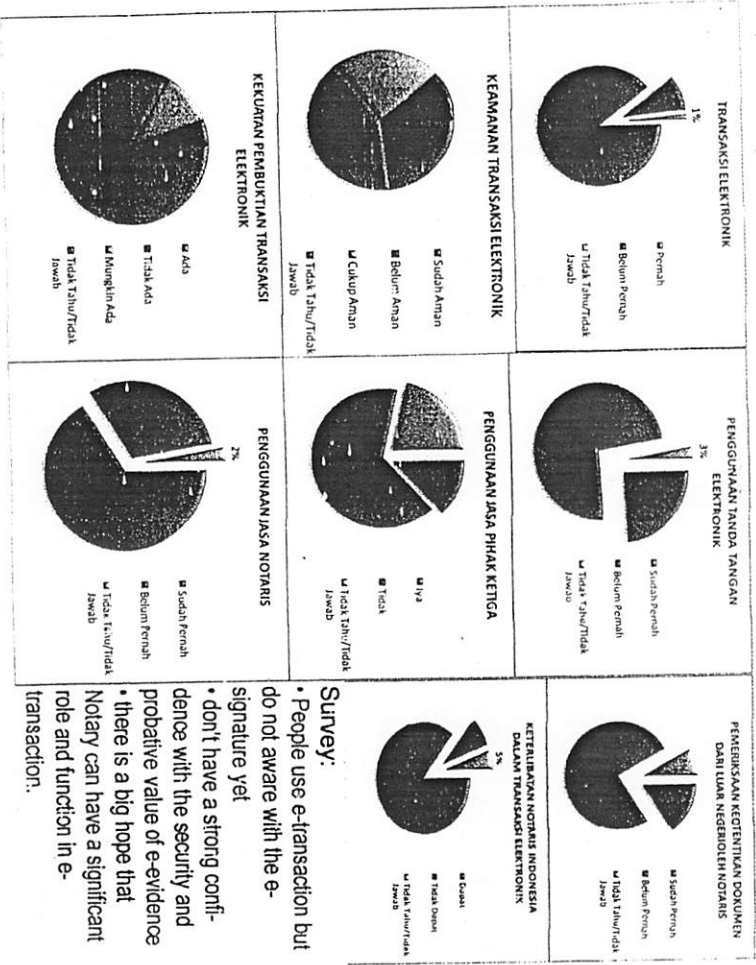
Models Regulations of PKI

- Self-Regulation => communities PKI
- "Mesh" PKI => Peer-to-peer
- "bridge" CSP.

BRIDGE CA

ROOT CA, ROOT CA, ROOT CA

CA1, CA1, CA1, CA1, CA1, CA1



German

Belgie

France

Section 124, German Civil Code. Written form
 (1) If written form is prescribed by statute, the document must be signed by the issuer with his name in his own hand, or by his notariarily certified initials.
 (2) In the case of a contract, the signature of the parties must be made on the same document. If more than one counterpart of the contract is drawn up, it suffices if each party signs the document intended for the other party.
 (3) Written form may be replaced by electronic form, unless the statute leads to a different conclusion.
 (4) Notarial recording replaces the written form.

Section 128a, Electronic form
 (1) If electronic form is to replace the written form prescribed by law, the issuer of the document must add the name to it and provide the electronic document with a qualified electronic signature in accordance with the Electronic Signature Act (Signaturgesetz).
 (2) In the case of a contract, the parties must each provide a counterpart with an electronic signature as described in subsection (1).

57a, German Notarial Act

Notarial certificates and other notarial instruments pursuant to § 57a may be established electronically. For that purpose, a qualified electronic signature pursuant to the Electronic Signature Act must be attached to the electronic notarial document. The signature shall be based on a certificate that is permanently verifiable. A confirmation by the competent authority concerning the use of the electronic signature must be attached to the notarial instrument. The notarial instrument shall indicate the place and date of issue.

at. 1322 civ. Code
 For the purpose of the present article, a data electronic form which can be attributed to a determined person and which contains the integrity of the content of the instrument exactly with the legal requirement of a signature.

Belgian Notary Act - 16 March 1803
 • Amendments under consideration
 • Delegation to a decree to fix the conditions of:
 - Creation and conservation of the public registers (Integrity & Confidentiality)
 - Creation of a Register for:
 • Digital copies of paper notary acts
 • Under the control of notariary Chamber of Notaries

Art. 1316 French Civil Code
 Documentary evidence, or evidence in writing, results from a sequence of letters, characters, figures or of any other sign or symbols having an intelligible meaning, whatever their medium and the ways and means of their transmission may be.

Art. 1316-1
 A document in electronic form is admissible as evidence in the same manner as a paper-based document, provided that the person from whom it proceeds can be duly identified and that it be established in conditions calculated to ensure its integrity.

Art. 1316-4
 The signature necessary to the execution of a legal transaction in the form of an electronic document is the electronic signature of the person who has concluded the transaction. When it is signed by a public officer, it contains authority to the document.
 Where the electronic document is a public document, the signature necessary to its execution is the electronic signature of the public officer, which is accompanied by the seal of the officer and the identity of the signatory, recorded and the integrity of the instrument is established, subject to the conditions laid down by decree in Council Order.

Art. 1317 civ. code:

An authentic instrument is one which has been received by public officers empowered to draw up such instruments at the place where the instrument was written and with the requisite formalities.
 - (Act n° 2000-230 of 13 March 2000) It may be drawn up on an electronic medium where it is established and stored in conditions fixed by decree in Council Order.

Survey:
 • People use e-transaction but do not aware with the e-signature yet
 • don't have a strong confidence with the security and probative value of e-evidence
 • there is a big hope that Notary can have a significant role and function in e-transaction.

Common Law (US, UK)

US Model Notary Law

§ 5-1 Power of Notary.

A notary is empowered to perform the following notarial acts:

- (1) acknowledgments;
- (2) oaths and affirmations;
- (3) jurats;
- (4) signature witnessings;
- (5) copy certifications;
- (6) verifications of fact; and
- (7) any other acts so authorized by the law of this [State].

§ 17-1 Authorized Electronic Notarial Acts.

The following notarial acts may be performed electronically:

- (1) acknowledgment;
- (2) jurat;
- (3) signature witnessing;
- (4) copy certification; and
- (5) verification of fact.

UK Legal Services Act 2007 & NOTARIES PRACTICE RULES 2009

"notarial act" means any act that has validity by virtue only of its preparation, performance, authentication, attestation or verification by a notary and includes any such act carried out by electronic means

Civil Law (Dutch)

Section 2 Dutch Notary Act

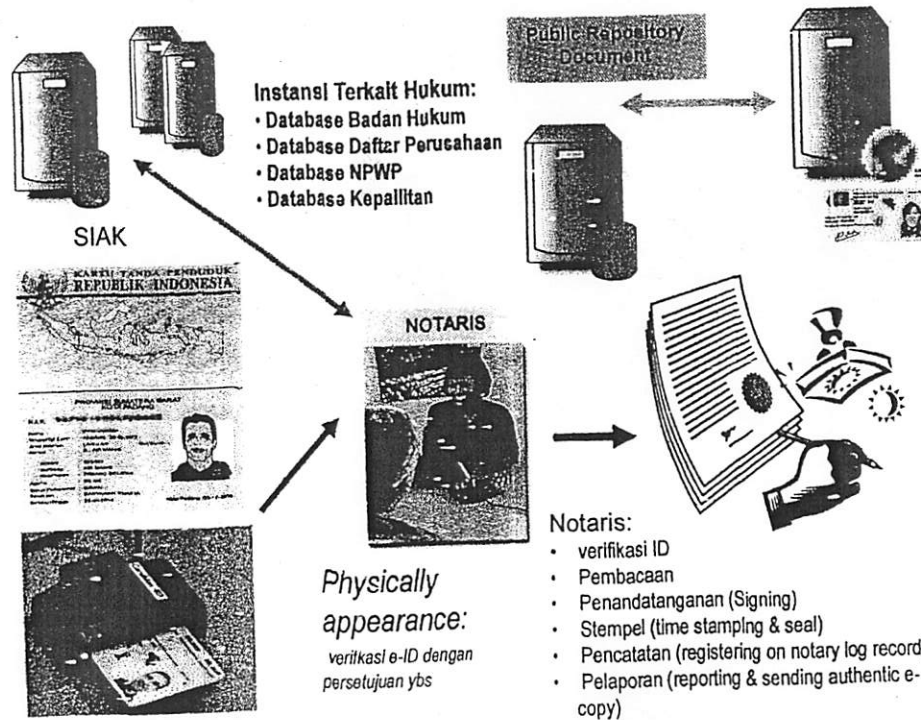
1. The office of notary confers the power to execute authentic notarial acts in the cases in which he is entrusted with this by law or a party requires this and to perform other activities with which he is entrusted by law.

The law requires a notarial deed for a number of agreements and legal transactions. The most important are:

1. conveying real property in the Netherlands;
2. creating and cancelling mortgages;
3. incorporating public and private limited liability companies (NVs and BVs) and altering their articles of association;
4. establishing foundations and associations (including cooperatives) and altering their constitution;
5. drawing up, altering and executing wills;
6. drawing up and altering marriage contracts (i.e. usually antenuptial settlements) and registered domestic partnership agreements;
7. transferring registered shares;
8. legalising signatures;
9. providing for gifts and donations in a notarial deed.

Section 33

1. Further rules concerning the data and declarations that should be included in copies and execution copies of and extracts from notarial acts may be adopted by order in council.
 2. Rules concerning the manner in which electronic copies of and electronic extracts from notarial acts are produced may be adopted by or pursuant to order in council.



Kesimpulan

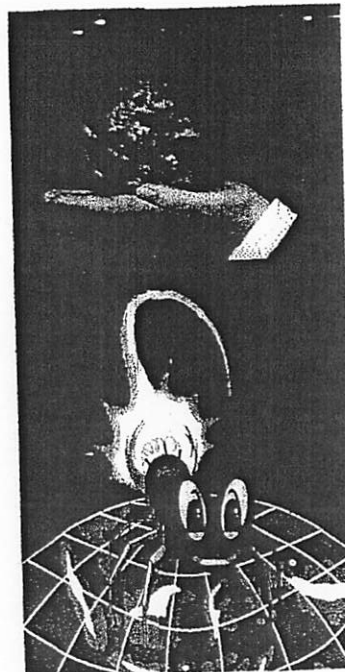
- Selayaknya Digital ID harus harmonis antara Database Kependudukan dengan Database Badan Hukum
 - o Mengapa Digital-ID berjalan secara linear dan kurang saling terintegrasi (e-KTP, e-Passport & INAFIS), dan terkesan menafikan e-ID private yang telah ada ?
 - o Mengapa tidak ada Public Repository Document ?
 - o Mengapa sektor tidak membuka diri kepada Kemkominfo + Lemsaneg untuk menjamin perlindungan dan akuntabilitas sistem elektronik ?
- Kita perlu bicarakan hal tersebut lebih jauh dalam kajian keautentikan dokumen public dalam adm pemth dan pelayanan public mendatang.

Terima Kasih

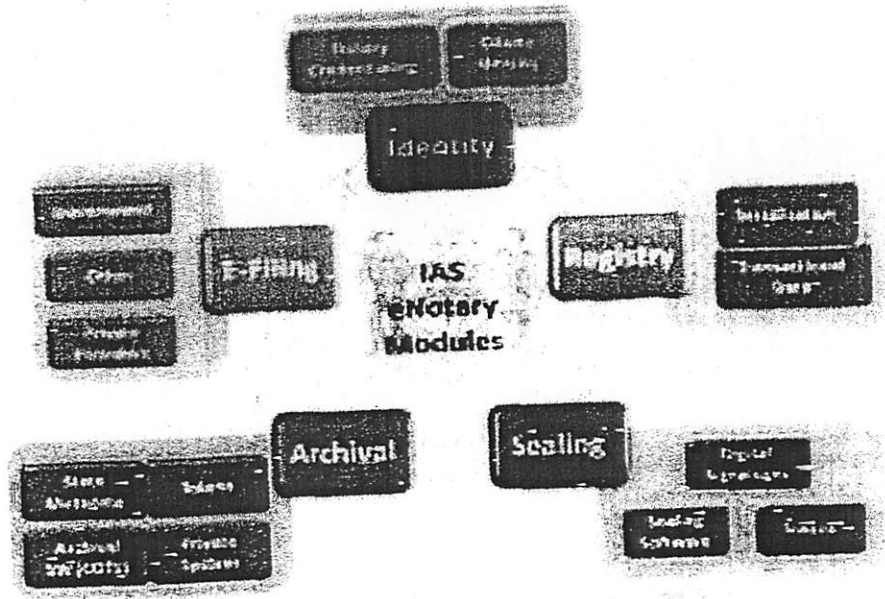


Capacity Building: Indonesia Sentra

- Mata melambangkan wawasan
- Senyum melambangkan optimisme
- Lampu melambangkan HKI
- Chip melambangkan penguasaan ICT
- Indonesia Sentra Geografis Dunia



Attachment :



Protokol Notaris Konvensional	Elektronik
<p>• Protokol Notaris terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> minuta Akta; buku daftar akta atau repertorium; buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar; buku daftar nama penghadap atau klapper; buku daftar protes; buku daftar wasiat; dan buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan <ul style="list-style-type: none"> Segel/Seal => Cap Notaris Duty stamp The form and format determined by a certain deed of Law => Bentuk dan format akta tertentu di tentukan oleh UU 	<p>Protokol</p> <ul style="list-style-type: none"> Paper Document <=> First original copy Electronic Notary Journal (log-book/list of deeds or any information) electronic notary seal electronic stamping certain format of e-document determined by law & regulations 